



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 07 Maret 2020

Halaman: 2

DANA BANPOL YOGYA RP 777 JUTA

60 Persen untuk Pendidikan Politik

UMBULHARJO (MERAPI) - Pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik (banpol) yang memiliki kursi di DPRD Kota Yogyakarta tahun 2020 menunggu hasil pemeriksaan laporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Besaran banpol tahun ini berdasarkan pada perolehan suara Pemilu 2019.

"Alokasi anggarannya masih sama seperti tahun lalu karena sudah disesuaikan juga dengan pemilu 2019," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Yogyakarta Zenni Lingga, Jumat (6/3).

Dia menyampaikan, pada tahun 2019 pencairan banpol dibagi dalam dua tahap yakni tahap pertama mengacu pada Pemilu tahun 2014 dan tahap kedua setelah Pemilu 2019 dengan hasil pemilu terbaru. Sedangkan pada tahun 2020 pencairan banpol dalam satu tahap berdasarkan Pemilu 2019.

Dia menyebut setiap suara sah yang diraih partai politik dihargai senilai Rp 3.446. Total ada 8 partai politik di DPRD Kota Yogyakarta yang berhak mendapatkan banpol yakni PDIP, PKS, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra,

Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Total alokasi anggaran dan banpol tahun 2020 sebanyak Rp 777,359 juta. ~

"Nilai suara sah banpol di Kota Yogyakarta sudah dua kali lipat dari anjuran Kemendagri yang hanya Rp 1.500 untuk tingkat kabupaten/kota," tambahnya.

Dia menjelaskan untuk pencairan Banpol tahun 2020 masih menunggu hasil audit laporan pertanggungjawaban penggunaan Banpol tahun 2019 dari partai politik oleh BPK. Semua partai politik penerima Banpol tahun 2019 sudah menyerahkan laporan itu ke BPK. Laporan pertanggungjawaban itu menjadi salah satu syarat pencairan Banpol tahun 2020.

"Laporan hasil pemeriksaan BPK itu juga menjadi evaluasi dan kontrol penggunaan Banpol. Dalam aturan Kemendagri penggunaan Banpol diprioritaskan untuk pendidikan politik. Tapi kami sesuai kesepakatan dengan partai politik di dewan, 60 persen Banpol untuk pendidikan politik dan 40 persen untuk kesekretariatan," tandas Zeni.

(Tri)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005